

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh:

**KEKE HASMITA
NPM 150412036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**KEKE HASMITA
NPM 150412036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**KEKE HASMITA
150214036**

Telah Diperiksa Dan Disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Zul Ammar, SE.,ME
NIDN. 1020088401

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN. 1014038901

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singgingi**

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN. 10140389901

**PENGARUH AKUNTANBILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

**KEKE HASMITA
150412036**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal, 29 OKTOBER 2019
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. Irwan, SE., MM	Ketua	
2	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Sekretaris	
3	Zul Ammar, SE.,ME	Anggota 1	
4	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Anggota 2	
5	Rina Andriani, SE., M.Ak	Anggota 3	
6	Diskhamarzawenny,SE.,MM	Anggota 4	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua
Program Studi Akuntansi

Zul Ammar, SE., ME
NIDN.1016038901

Yul Emri Yulis, SE.,M.Si
NIDN. 1020088401

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEKE HASMITA
NPM : 150214036
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Fakultas : ILMU SOSIAL

Dengan ini menyetakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memproleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan dan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Teluk Kuantan, Maret 2020
Yang membuat Pernyataan

KEKE HASMITA
NPM. 150214036

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi”**. Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, M.M** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE.,ME** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesaiya skripsi ini.
4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE.,MM** selaku Dosen Penasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. **Bapak dan Ibu dosen** program studi akuntansi fakultas ilmu sosial universitas islam Kuantan singingi yang telah memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan.

6. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua tercinta ayahanda **Yanfarizal**, ibunda **Suhasmi** dan juga adik tercinta **Ferdi** yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Terima kasih pula untuk suami **Rado Saputra** dan anak tercinta **Abil Rakel Saputra** cinta, kasih sayang dan pengorbanan kalian luar biasa sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan yang mana penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.
9. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Teluk Kuantan, Maret 2020

Penulis,

Keke Hasmita
NPM 150412036

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Keke Hasmita
Zul Ammar
Yul Emri Yulis**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah badan dan dinas yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini diperoleh dari menyebarkan kuesioner. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ABSTRACT

EFFECT OF PUBLIC ACCOUNTABILITY AND BUDGET CLARITY TARGETS ON MANAGERIAL PERFORMANCE IN THE REGIONAL ORGANIZATION OF THE KUANTAN SINGINGI REGENCY (OPD)

**Keke Hasmita
Zul Ammar
Yul Emri Yulis**

The purpose of this study was to determine whether public accountability partially has a significant effect on managerial performance in the Regional Organization of the Kuantan Singingi Regency. To find out whether the clarity of the budget target partially has a significant effect on managerial performance in the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD) and to find out whether public accountability and clarity of the budget target simultaneously have a significant effect on managerial performance in the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD) .

This research was conducted using a purposive sampling method, where samples were taken based on certain criteria. The sample in this study were agencies and offices located in Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from distributing questionnaires. This research is a quantitative descriptive study with a correlational approach. Analysis of the data used in this study is a multiple linear regression test using the t test and the coefficient of determination test.

The results of the study concluded that public accountability partially has a significant effect on the managerial performance of the Regional Organization of the Kuantan Singingi District. Clarity of budget targets partially has a significant effect on the managerial performance of the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD). Public accountability, the clarity of budget targets simultaneously has a significant effect on the managerial performance of the Kuantan Singingi District Organization.

Keywords: *Public Accountability, Clarity of Budget Objectives, Managerial Performance, Regional Organizations (OPD)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Akuntabilitas Publik.....	8
2.1.2. Kejelasan Sasaran Anggaran	15
2.1.3. Kinerja Manajerial.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	24
2.4 Kerangka Penelitian	26

2.5	Hipotesis Penelitian	27
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1	Rancangan Penelitian	29
3.2	Tempat dan Waktu	29
3.3	Populasi dan Sampel.....	30
	3.3.1. Populasi.....	30
	3.3.2. Sampel	30
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	33
	3.6.1. Variabel Penelitian.....	33
	3.6.2. Defenisi Operasional	34
3.7	Instrumen Penelitian.....	35
3.8	Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.2	Deskripsi Data	46
4.3	Karakteristik responden	47
	4.3.1 Jenis Kelamin	47
	4.3.2 Umur	48
	4.3.3 Pendidikan.....	48
4.4	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
	4.4.1 Variabel Kinerja Manajerial.....	49
	4.4.2 Variabel Akuntabilitas Publik (X1).....	52
	4.4.3 Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) .	54
4.5	Uji Kualitas Data	57
	4.5.1 Uji Validitas.....	57
	4.5.2 Uji Reabilitas.....	58
4.6	Uji Asumsi Klasik	59
	4.6.1 Uji Normalitas	59

4.6.2 Uji Multikolinearitas	60
4.6.3 Uji Autokorelasi.....	61
4.6.4 Uji Heteroskedastisitas	62
4.7 Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.8 Pengujian Hipotesis.....	64
4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
 BAB V PENUTUP.....	 72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
3.1 Waktu Kegiatan Penelitian.....	30
3.2 Daftar Nama SKPD Kabupaten Kuantan Singgingi	32
3.3 Defenisi Operasional Variabel	34
3.4 Klasifikasi Penilaian Normatif.....	36
4.1 Rincaian Penyebaran Kuesioner.....	47
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
4.5 Tanggapan responden Terhadap Variabel Kinerja Manajerial (Y)..	50
4.6 Tanggapan responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Publik (X1)	53
4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	55
4.8 Uji Validitas.....	57
4.9 Hasil Uji Reliabilitas	58
4.10 Uji Multikolinearitas.....	60
4.11 Uji Autokorelasi.....	61
4.12 Koefisien Regresi Berganda	62
4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t)	64
4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)	65
4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Penelitian.....	27
4.1	Uji Normalitas Histogram	60
4.2	Uji Heteroskedastisitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Kuisioner Tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	78
Lampiran 2	Tabulasi Kuisioner Penelitian.....	82
Lampiran 3	Hasil Statistik Deskriptif	88
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	95
Lampiran 5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	98
Lampiran 6	Hasil Uji Hipotesis	100
Lampiran 7	R Tabel	101
Lampiran 7	T Tabel	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralistik partipatoris (Mardiasmo, 2009:4). Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi pada tata pemerintahan dalam era otonomi daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Bastian (2011:28) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Mahoney et. al (1963) dalam Putra (2013:2) kinerja manajerial merupakan suatu kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Kualitas proses

pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu salah satu sistem penganggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Putra (2013:2) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas ini, maka adanya kemudahan dalam mempertanggung jawabkan berhasil atau gagalnya pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja, sehingga akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak bersemangat dalam meningkatkan kinerja.

Aji (2011) telah melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun penelitian yang dilakukan Putri (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang.

Putra (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putra (2013) mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya, yaitu peneliti mengambil objek di Kabupaten Kuantan Singgingi.

Alasan memilih Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi sebagai objek penelitian ini karena saat ini nilai Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kuantan Singgingi hanya berada pada nilai 51,62 atau nilai "CC" dari KemenPAN-RB (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2018). Ini dikarenakan dengan adanya temuan masalah yang terkait kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1)

penatausahaan kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang memadai, (2) aset tidak diyakini kewajarannya, (3) penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan ini membuktikan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan harapan. Selain itu permasalahan yang lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) lambatnya pengesahan APBD dan (2) tingkat kedisiplinan ASN masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas Publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Apakah Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik secara parsial terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti

untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi dilapangan, sekaligus memberikan pelatihan pada peneliti untuk dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengevaluasi kinerja manajerial.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meningkatkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Melalui akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan (Darmawan, 2016).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Konteks organisasi publik berarti pemberian informasi atas aktifitas dan kinerja pemerintah kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mahsun *et al*, 2015:170).

Adanya pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas mempertanggungjawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya secara nyata.

Akuntabilitas merupakan wujud tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah.

Dalam sistem pemerintahan, khuhusnya dalam kaitan dengan publik. Akuntabilitas merujuk kepada bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. pelaksanaan aktivitas pemerintahan maupun pengambilan keputusan perlu memperhatikan hak-hak publik sebagai pemberi amanah.

Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas dalam undang-undang tersebut bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan aktivitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terlihat dari sejauh mana transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah mengambil peran penting dari terlaksananya pelayanan yang akuntabel oleh karena akuntabilitas terkait dengan segala aktivitas pemerintah. Seperti yang dikemukakan Mulgar dan Uhnr (Raba, 2012:14), akuntabilitas merupakan konsep yang terkait dengan aktivitas *governance* yaitu dengan upaya untuk membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks social.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk

menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.

Menurut Rosjidi (2012:56) akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Ellwood dalam Mardiasmo (2009:31) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:

Menurut Tangkilisan (2013:15) dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.

Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a. Integritas Keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (2013) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan nisi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan nisi agar akuntabel.
5. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, yangAnggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, yang menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan (Putra, 2013:6). Anggaran juga merupakan alat

bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumberdaya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Bastian (2011:163) anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan (Asrini, 2017:53).

Menurut Bastian (2011:163) anggaran adalah pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Anggaran mempunyai karakteristik:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran (Putra, 2013:6) yaitu sebagai berikut :
 1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tujuan yang dibuat merupakan pedoman dan tata cara pelaksanaan kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yang termuat dalam dokumen rencana startegis (renstra) SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
 2. Kinerja, menetapkan indikator kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. Yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
 3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. Untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal.
 4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk penggerjaan. Yaitu tindakan nyata dalam angka waktu tertentu yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. Dengan banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang harus selesaikan, maka harus membuat sasaran prioritas. Seberapa penting pekerjaan itu dan kapan harus diselesaikan.
6. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya. Yaitu menetapkan daftar yang berisi tugas-tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang termudah hingga tugas yang dirasa sulit dan memiliki waktu yang lebih banyak dalam menyelesaiannya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi. Pengkoordinasian merupakan proses menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang akan disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Karena begitu luasnya kejelasan anggaran, maka tujuan anggaran harus dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dapat dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Beberapa penelitian yang diungkap menyatakan bahwa mencantum sasaran anggaran secara spesifik dan hanya akan mendorong karyawan melakukan yang terbaik. Kejelasan anggaran yang diharapkan dapat membantu atasan untuk mencapai tujuan perusahaan sbagaimana yang

tercantum dalam perencanaan anggaran, sehingga secara logis kinerja dapat tercapai (Putra, 2013:6).

2.1.3 Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kinerja kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala sub seksi. Dalam kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self rating yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) dalam Wahyuni (2014:26), di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam delapan dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang secara keseluruhan. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Mahoney, *et.al* (1963) dalam Wahyuni (2014) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator:

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan,

prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.
6. Pemilihan staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.

7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Kinerja manajerial merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013). Tujuan pokok kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membawa tindakan dan hasil yang diinginkan dengan melalui umpan balik kerja (Sumolang, 2015).

Pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik sangat penting baik bagi pihak yang memberi amanah (masyarakat) maupun yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun *et al*, 2015: 146).

Sedangkan untuk yang diberi amanah pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang mereka raih (Mahsun *et al*, 2015: 146).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Citra Lardiana Putri (2010)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kota Semarang	Partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Semarang dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Semarang.
2	Fakih Sabdanala Aji (2011)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo.	Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo.
3	Deki Putra (2013)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang	Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4	Wahyuni, Rasuli, Diyanto	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,	Kejelasan sasaran anggaran dan

	(2014)	Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Pemerintahan Kota Pekanbaru	akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, sedangkan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD.
5	Primadana, Yuniarta, Adiputra (2014)	Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung)	Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD
6	Asrini, Sulindawati, Sinarwati (2014)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung	Secara parsial dan secara simultan akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.
7	Darmawan (2016),	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis	Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern masing-masing berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bengkalis.
8	Afifah Nur Ufairah (2016)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi)	Evaluasi anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
9	Petriana Heski (2017).	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

		Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang).	manajerial. Sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial
10	Asrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu	Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD, Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD, Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD, dan ketiga-tiganya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD.

Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2019

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang

ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah telah banyak banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Citra (2010) dan Fakih (2011) dalam hasil penelitiannya keduanya sama-sama menyebutkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Orgnaisasi Perangkat Daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heski (2017) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H1 : Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Kejelasan sasaran anggaran akan dapat dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing

OPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah telah banyak banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2016) dan Putra (2013) dalam hasil penelitiannya ketiganya sama-sama menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Orgnaisasi Perangkat Daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ufairah (2016) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

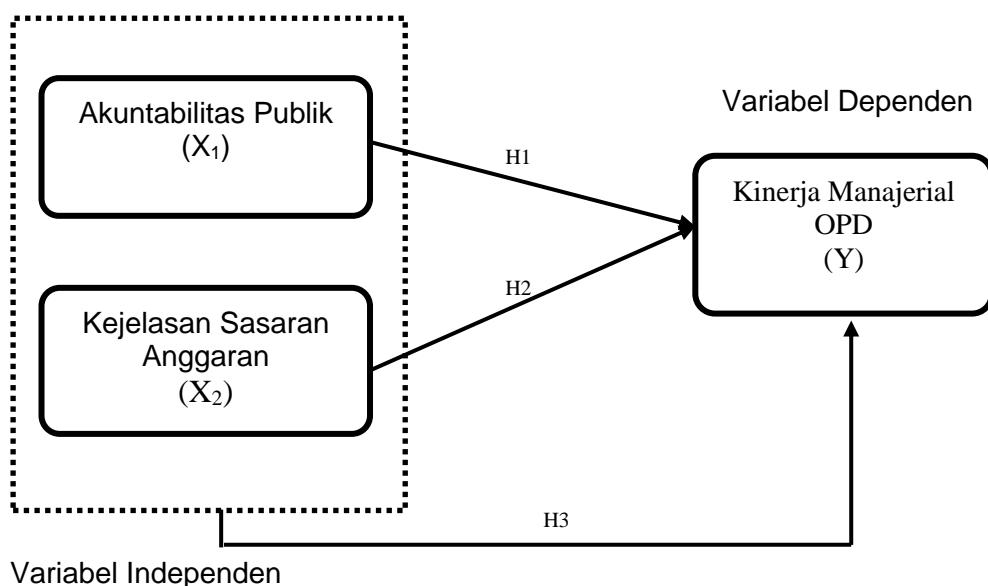
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H2 : Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Kuantan Singgingi.

2.4 Kerangka Penelitian

Berikut ini kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi perangkat daerah yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber : (Putra, 2013).

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

H2 : Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

H3 : Akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2010:12) "Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif".

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih dari variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Waktu Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2020															
		Jan-Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																
2	Seminar proposal								1								
3	Revisi Proposal									1							
4	Penelitian Lapangan									1							
5	Pengolahan data dan Analisis Data									1							
6	Bimbingan Skripsi									1							
7	Ujian Skripsi									1							
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi									1							

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2010:130).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 26 OPD.

3.3.2 Sampel

Menurut Iskandar (2011:69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Dalam penelitian ini pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah badan dan dinas yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Responden dalam penelitian ini adalah 3 orang yaitu pimpinan OPD sebanyak 1 orang, Kepala Bagian Keuangan 1 orang dan Staf Bagian Keuangan 1 orang pada masing-masing OPD. Sampel terpilih

selanjutnya ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Daftar Nama OPD Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama OPD	Responden
1	Sekretariat Daerah	3
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3
3	Badan Pendapatan Daerah	3
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3
5	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3
8	Rumah Sakit Umum Daerah	3
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3
10	Dinas Kesehatan	3
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan	3
13	Dinas Perhubungan	3
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
16	Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan	3
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
18	Dinas Pertanian	3
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	3
21	Dinas Lingkungan Hidup	3
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
23	Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	3
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	3
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3
26	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPDB)	3
Total		78

Sumber :Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, 2019.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, menurut Iskandar (2011:252) data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang berupa tanggapan dari responden tentang akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi.
- b. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2010:225) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, menurut Usman (2014:52), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian penulis melakukan pengamatan atau terjun ke lapangan secara langsung ke lokasi penelitian.

- b. Angket/kuesioner, menurut Riduwan (2012:25), kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab sesuai dengan alternatif jawaban yang ada.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Variabel bebas.

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Berdasarkan hipotesis diatas, yang menjadi variabel bebas adalah:

- a. Akuntabilitas publik (X1)

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2002).

- b. Kejelasan sasaran anggaran (X2)

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Putra, 2013).

2. Variabel terikat

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yang sifatnya independen. Variabel

terikat dapat juga disebut sebagai variabel yang diduga sebagai akibat (*presumed effect variable*) atau variabel konsekuensi.

Berdasarkan hipotesis diatas, yang menjadi variabel terikat adalah kinerja manajerial yang diberi simbol (Y). Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial (Wahyuni, 2014).

3.6.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dalam suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Kategori
1	Kinerja manajerial (Y)	Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam melaksanakan kegiatan manajerial, yang meliputi kegiatan perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, dan perwakilan (Mahoney, 1963 dalam Wahyuni, 2014).	1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Koordinasi 4. Evaluasi 5. Pengawasan 6. Pemilihan staff 7. Negosiasi 8. Perwakilan (Wahyuni, 2014)	-Sangat setuju - Setuju - Netral - Tidak setuju -Sangat tidak setuju

2	Akuntabilitas Publik (X1)	Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2002).	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas program 3. Akuntabilitas proses 4. Akuntabilitas kebijakan kerja (Mardiasmo, 2002)	-Sangat setuju -Setuju -Netral - Tidak setuju -Sangat tidak setuju
3	Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut (Putra, 2013).	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka waktu 5. Sasaran prioritas 6. Tingkat kesulitan 7. Koordinasi (Putra, 2013)	-Sangat setuju -Setuju -Netral -Tidak setuju -Sangat tidak setuju

Sumber: Data Olahan, 2019.

3.7 Instrumen Penelitian

Arikunto (2010: 160) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah angket atau kuisioner. Jawaban responden ditabulasi dengan skala likert. Menurut Usman (2014:65) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu objek. Bentuk skala likert adalah 1 sampai 5. Dalam penelitian ini skor jawaban responden dalam penelitian terdiri atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi lain yang bertingkat:

1. Untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai = 5
2. Untuk jawaban setuju (S) diberi nilai = 4
3. Untuk jawaban netral (N) diberi nilai = 3
4. Untuk jawaban tidak setuju (TS) diberi nilai = 2
5. Untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi nilai = 1

Agar dapat mengambil keputusan dari penelitian maka penulis menghitung tiap skor menurut kategori dengan cara mengalikan kriteria dengan jumlah responden yang memilih. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan cara mengalikan jumlah responden (N) dengan bobot paling rendah dan paling tinggi:

Nilai terendah = 1

Nilai tertinggi = 5

Skala penilaian tiap kategori dari skala a sampai e dapat diketahui tentang masing-masing golongan dengan menggunakan rumus :

$$Rs = \frac{5-1}{5} = 0,8 \text{ (Sudijono, 2012:43).}$$

Dengan demikian dapat dinyatakan penilaian normatif yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Penilaian Normatif

No	Klasifikasi	Interval
1	Sangat baik.	4,2 - 5,0
2	Baik.	3,3 - 4,1
3	Kurang baik.	2,5 - 3,2
4	Tidak baik.	1,9 - 2,6
5	Sangat tidak baik.	1,0 - 1,8

Sumber: Data olahan, 2019.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Linear Berganda, metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan normalitas). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 21.00.

3.8.2 Uji Kualitas Data

3.8.2.1 Uji Validitas (Ketepatan)

Uji validitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner yang valid berarti kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data itu valid. Kuesioner dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Iskandar, 2011:151).

3.8.2.2 Uji Reliabilitas (Konsistensi)

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:132). Pengujian konsisten internal penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α). Teknik *cronbach alpha* merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang popular dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. Apabila koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 maka instrument tersebut reliable, sebaliknya jika koefisien alpha instrument tersebut lebih rendah dari 0,60 maka instrument tersebut tidak reliable untuk digunakan dalam penelitian ini (Ghozali:2011:132).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residu berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residu adalah uji parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$ berarti data berdistribusi dengan normal

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Jika ada, maka berarti terdapat multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*varians inflation factor*) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau nilai *Tolerance* $< 0,10$, berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011:137).

3.8.3.3 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode ke t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat autokorelasi. Autokorelasi sering muncul pada data *time series*. Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson (DW test). Secara umum dapat diambil patokan :

Jika DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif

Jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

Jika DW diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.8.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplots*. jika membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika titik-titik tersebut menyebar secara tidak teratur (pola tidak jelas) diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja manjerial OPD

a : Konstanta (*intercept*)

b₁ : Koefisien regresi akuntabilitas publik

b₂ : Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran

X₁ : Akuntabilitas publik

X₂ : Kejelasan sasaran anggaran

e : Tingkat Kesalahan Pengganggu (*error term*)

3.8.5 Uji Hipotesis

3.8.5.1 Uji t

Menurut Ghozali (2011:122) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifinance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan >0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak menyukai pengaruh signifikat terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.5.2 Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali (2011;99). Uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikat f dapat output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi-variasi dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singgingi

Kabupaten Kuantan Singgingi atau sekarang lebih dikenal dengan singkatan Kuansing, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singgingi disebut pula Rantau Kuantan. Ibu kota kabupaten ini adalah Taluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singgingi berada di bagian selatan provinsi Riau dan terletak pada jalur tengah lintas Sumatera. Kabupaten Kuantan Singgingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singgingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singgingi terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singgingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai
7. Kecamatan Hulu Kuantan.
8. Kecamatan Gunung Toar.
9. Kecamatan Singgingi Hilir.
10. Kecamatan Pangean.

11. Kecamatan Logas Tanah Darat.

12. Kecamatan Inuman.

13. Kecamatan Sentajo Raya

14. Kuantan Hilir Seberang

15. Pucuk Rantau

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 – 2001

2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 – 2006

3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2016

4. H. Mursini Periode Tahun 2016 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya "angin reformasi" memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai kuantan atau yang sekarang bernama sungai Indragiri dan sungai singing. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai kuantan mengaliri 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0°00' -1° 00' Lintang Selatan dan 101 ° 02' - 1010 55' Bujur Timur. Dikabupaten Kuantan Singingi juga terdapat beberapa objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi

3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

4.1.2 Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2016 tercatat sebanyak 317.935 jiwa yang terdiri 163.213 jiwa laki-laki dan 154.722 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.874 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.778 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 163.213 jiwa dan perempuan berjumlah 154.722 jiwa. Rasio jenis kelamin 105,49. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau 117,95 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pangean sebesar 99,12.

4.1.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 26OPD, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Rumah Sakit Umum Daerah
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
21. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
22. Dinas Lingkungan Hidup
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian
25. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.2 Deskripsi Data

Data yang didapat dari penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebaran kuesioner ini dilakukan lebih kurang dua minggu. Untuk lebih jelasnya rincian penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rincaian Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Total kuesioner yang dikirim	78	100%
2	Total kuesioner yang kembali	78	100%
3	Total kuesioner yang tidak kembali	-	-
4	Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
5	Total kuesioner yang dapat dianalisis	78	100%

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa total kuesioner yang disebar sebanyak 78 kuesioner untuk 26 OPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Total kuesioner yang dikembalikan berjumlah 78 kuesioner (100%), seluruh kuesioner dapat digunakan dan dianalisis untuk selanjutnya karena jawaban yang diberikan responden lengkap. Sehingga data yang layak dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 78 kuesioner.

4.3 Karakteristik Responden

4.3.1 Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	62	79%
2	Perempuan	16	21%
Jumlah		78	100%

Sumber: Data Olahan, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas di ketahui bahwa dari 78 responden sebanyak 62 orang atau 79% adalah responden laki-laki, dan 16 orang atau 21% adalah responden perempuan. Jadi responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan

4.3.2 Umur

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 – 30	18	23%
2	31 – 40	48	62%
3	40 tahun ke atas	12	15%
Jumlah		78	100%

Sumber: Data Olahan, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas di ketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 18 orang responden atau 23% dari jumlah responden, sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 48 orang responden atau 62% dari jumlah responden dan responden yang berusia 40 tahun ke atas sebanyak 12 orang responden atau sebanyak 15% dari jumlah seluruh responden.

4.3.3 Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Percentase (%)
1	DIII	3	4%
2	S1	66	85%
3	S2	9	11%
Jumlah		78	100%

Sumber: Data Olahan, 2019.

Dari Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan responden sangat bervariasi untuk responden yang berpendidikan DIII sebanyak

3 orang atau 4%, yang berpendidikan S1 sebanyak 66 orang atau 85%, kemudian yang tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 11%.

4.4 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2013:19). Analisis data penelitian ini dilakukan pada 20 item pernyataan dalam kuisioner yang dinilai oleh responden yang ditetapkan dalam penelitian ini.

4.4.1 Variabel Kinerja Manajerial (Y)

Variabel kinerja manajerial (Y) terdiri dari 9 item pernyataan, item pertama yaitu berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program (Y.1), item kedua yaitu berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan (Y.2), item ketiga yaitu ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan (Y.3), item keempat yaitu berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit atau sub unit saya (Y.4), item kelima yaitu berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit atau sub unit (Y.5), item keenam yaitu berperan dalam mengelola, mengatur dan memilih pegawai pada uni/sub unit (Y.6), item ketujuh yaitu berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang

dibutuhkan pada pada uni&sub unit saya dengan pihak luar (Y.7), item kedelapan yaitu berperan dalam mewakilkan organisasi daya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi (Y.8), item kesembilan yaitu mengevaluasi kinerja secara keseluruhan (Y.9).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Manajerial (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	SS	S	N	TS	STS			
Y.1	33,3%	29,5%	35,9%	1,3%	-	100%	3,95	Baik
Y.2	32,1%	39,7%	26,9%	1,3%	-	100%	4,03	Baik
Y.3	30,8%	42,3%	26,9%	-	-	100%	4,04	Baik
Y.4	28,2%	33,3%	34,6%	3,8%	-	100%	3,86	Baik
Y.5	20,5%	38,5%	35,9%	5,%	-	100%	3,74	Baik
Y.6	21,8%	47,4%	28,2%	2,6%	-	100%	3,88	Baik
Y.7	59,0%	7,7%	33,3%	-	-	100%	4,26	Sangat Baik
Y.8	20,5%	46,2%	24,4%	9,0%	-	100%	3,78	Baik
Y.9	20,5%	51,3%	26,9%	1,3%	-	100%	3,91	Baik
Rata-rata	3,93							Baik

Sumber: Data olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 untuk item berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program (Y.1) sebagian besar responden menjawab netral yaitu 35,9% dengan rata-rata item sebesar 3,95 berada pada kategori baik. Untuk item berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 39,7% dengan

rata-rata item sebesar 4,03 berada pada kategori baik. Untuk item ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan (Y.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 42,3% dengan rata-rata item sebesar 4,04 berada pada kategori baik. Untuk item berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit atau sub unit saya (Y.4) sebagian besar responden menjawab netral yaitu 34,6% dengan rata-rata item sebesar 3,86 berada pada kategori baik. Untuk item berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit atau sub unit (Y.5) sebagian besar responden menjawab netral yaitu 35,9% dengan rata-rata item sebesar 3,74 berada pada kategori baik. Untuk item berperan dalam mengelola, mengatur dan memilih pegawai pada uni/sub unit (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 47,4% dengan rata-rata item sebesar 3,88 berada pada kategori baik. Untuk item berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada pada uni/sub unit saya dengan pihak luar (Y.7) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 59% dengan rata-rata item sebesar 4,26 berada pada kategori sangat baik. Untuk item berperan dalam mewakilkan organisasi daya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi (Y.8) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 46,2% dengan rata-rata item sebesar 3,78 berada pada kategori baik. Untuk item mengevaluasi kinerja secara keseluruhan (Y.9) sebagian besar responden menjawab

setuju yaitu 51,3% dengan rata-rata item sebesar 3,91 berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja manajerial (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item Y.7 dengan kriteria penilaian sangat baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item Y.5 hanya 3,74. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,93. Artinya kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.4.2 Variabel Akuntabilitas Publik (X₁)

Variabel akuntabilitas publik (X₁) terdiri dari 4 item pernyataan, item pertama yaitu pelaksanaan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban sesuai kondisi dan hasil yang ada. Serta penggunaan anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku (X_{1.1}), item kedua yaitu prosedur yang digunakan dalam melaksakan program kegiatan telah sesuai dengan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen (X_{1.2}), item ketiga yaitu program-program anggaran dirancang dengan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan pencapaian target serta hasil output maksimal(X_{1.3}), item keempat yaitu pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat lain (X_{1.4}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.6
Tanggapan responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Publik (X₁)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	SS	S	N	TS	STS			
X _{1.1}	41,0%	29,5%	29,9%	-	-	100%	4,12	Baik
X _{1.2}	38,5%	32,1%	29,5%	-	-	100%	4,09	Baik
X _{1.3}	23,1%	46,2%	30,8%	-	-	100%	3,92	Baik
X _{1.4}	12,8%	60,3%	24,4%	2,6%	-	100%	3,83	Baik
Rata-rata	3,99							Baik

Sumber: Data olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 untuk item pelaksanaan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban sesuai kondisi dan hasil yang ada. Serta penggunaan anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku (X_{1.1}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 41% dengan rata-rata item sebesar 4,12 berada pada kategori baik. Untuk item prosedur yang digunakan dalam melaksakan program kegiatan telah sesuai dengan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen (X_{1.2}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 38,5% dengan rata-rata item sebesar 4,09 berada pada kategori baik. Untuk item program-program anggaran dirancang dengan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan pencapaian target serta hasil output maksimal (X_{1.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 46,2% dengan rata-rata item sebesar 3,92 berada pada kategori baik. Untuk item pelaporan pertanggungjawaban kepada

pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat lain (X_{1.4}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 60,3% dengan rata-rata item sebesar 3,83 berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas publik (X₁) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item X_{1.1} dengan kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item X_{1.4}. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,99. Artinya akuntabilitas publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.4.3 Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂)

Variabel kejelasan sasaran anggaran (X₂) terdiri dari 7 item pernyataan, item pertama yaitu memahami persis apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan (X_{2.1}), item kedua yaitu memahami bagaimana kinerjanya diukur (X_{2.2}), item ketiga yaitu memiliki sasaran yang jelas yang membantu dalam melakuikan pekerjaan (X_{2.3}), item keempat yaitu mempunyai batas waktu mencapai sasaran pekerjaan (X_{2.4}), item kelima yaitu mempunyai lebih satu sasaran untuk dicapai dan mengetahui mana yang paling penting dan kurang penting (X_{2.5}), item keenam yaitu sasaran dalam pekerjaan cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah walaupun sulit) (X_{2.6}), item ketujuh yaitu dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran (X_{2.7}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kejelasan Sasaran
Anggaran (X₂)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	SS	S	N	TS	STS			
X _{2.1}	16,7%	56,4%	26,9%	-	-	100%	3,90	Baik
X _{2.2}	11,5%	74,4%	14,1%	-	-	100%	3,97	Baik
X _{2.3}	25,6%	51,3%	23,1%	-	-	100%	4,03	Baik
X _{2.4}	21,8%	60,3%	17,9%	-	-	100%	4,04	Baik
X _{2.5}	16,7%	43,6%	24,4%	15,4%	-	100%	3,62	Baik
X _{2.6}	5,1%	87,2%	5,1%	2,6%	-	100%	3,95	Baik
X _{2.7}	10,3%	65,4%	21,8%	2,6%	-	100%	3,83	Baik
Rata-rata	3,90						Baik	

Sumber: Data olahan, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.9 untuk item memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya (X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 56,4% dengan rata-rata item sebesar 3,90 berada pada kategori baik. Untuk item memahami bagaimana kinerja saya diukur (X_{2.2}) sebagian besar responden

menjawab sangat setuju yaitu 74,4% dengan rata-rata item sebesar 3,97 berada pada kategori baik. Untuk item memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya dalam melakukian pekerjaan (X_{2.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 51,3% dengan rata-rata item sebesar 4,03 berada pada kategori baik. Untuk item mempunyai batas waktu mencapai sasaran pekerjaan (X_{2.4}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 60,3% dengan rata-rata item sebesar 4,04 berada pada kategori baik. Untuk item mempunyai lebih satu sasaran untuk dicapai, saya mengetahui mana yang paling penting dan kurang penting (X_{2.5}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 43,6% dengan rata-rata item sebesar 3,62 berada pada kategori baik. Untuk item sasaran dalam pekerjaan cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah walaupun sulit) (X_{2.6}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 87,2% dengan rata-rata item sebesar 3,95 berada pada kategori baik. Untuk item dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran (X_{2.7}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 65,4% dengan rata-rata item sebesar 3,83 berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kejelasan sasaran anggaran (X₂) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item X_{2.4} dengan kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item X_{2.5}. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,90. Artinya kejelasan

sasaran anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.5 Uji Kualitas Data

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisa dengan program spss outputnya bernama *corrected item-total correlation*. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan tabel r *product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 78 atau $df = 76$ sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar 0,279. Tingkat kevalidan kuesioner dapat ditentukan apabila r hitung $>$ r tabel = valid dan r hitung $<$ r tabel = tidak valid.

Tabel 4.8
Uji Validitas

Indikator	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kinerja Manajerial (Y)	Y.1	0,580	0,227	Valid
	Y.2	0,558	0,227	Valid
	Y.3	0,561	0,227	Valid
	Y.4	0,621	0,227	Valid
	Y.5	0,611	0,227	Valid
	Y.6	0,543	0,227	Valid

	Y.7	0,549	0,227	Valid
	Y.8	0,394	0,227	Valid
	Y.9	0,447	0,227	Valid
Akuntabilitas Publik (X ₁)	X _{1.1}	0,455	0,227	Valid
	X _{1.2}	0,562	0,227	Valid
	X _{1.3}	0,430	0,227	Valid
	X _{1.4}	0,395	0,227	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	X _{2.1}	0,583	0,227	Valid
	X _{2.2}	0,559	0,227	Valid
	X _{2.3}	0,595	0,227	Valid
	X _{2.4}	0,583	0,227	Valid
	X _{2.5}	0,582	0,227	Valid
	X _{2.6}	0,542	0,227	Valid
	X _{2.7}	0,534	0,227	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui hasil uji validitas variabel kinerja manajerial (Y), akuntabilitas publik (X₁) dan kejelasan sasaran anggaran (X₂) mempunyai nilai r hitung setiap item pertanyaan lebih besar dibandingkan nilai r tabel. Dengan demikian item pertanyaan atau kuesioner yang digunakan oleh variabel kinerja manajerial, akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

4.5.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk memngetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Reabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat pada nilai *cronbach's alpha* (α), yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih kecil ($<$) 0,6 maka indikator atau kuesioner tidak *reliabel*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kinerja Manajerial (Y)	0,832	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Publik (X ₁)	0,677	0,60	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran(X ₂)	0,824	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

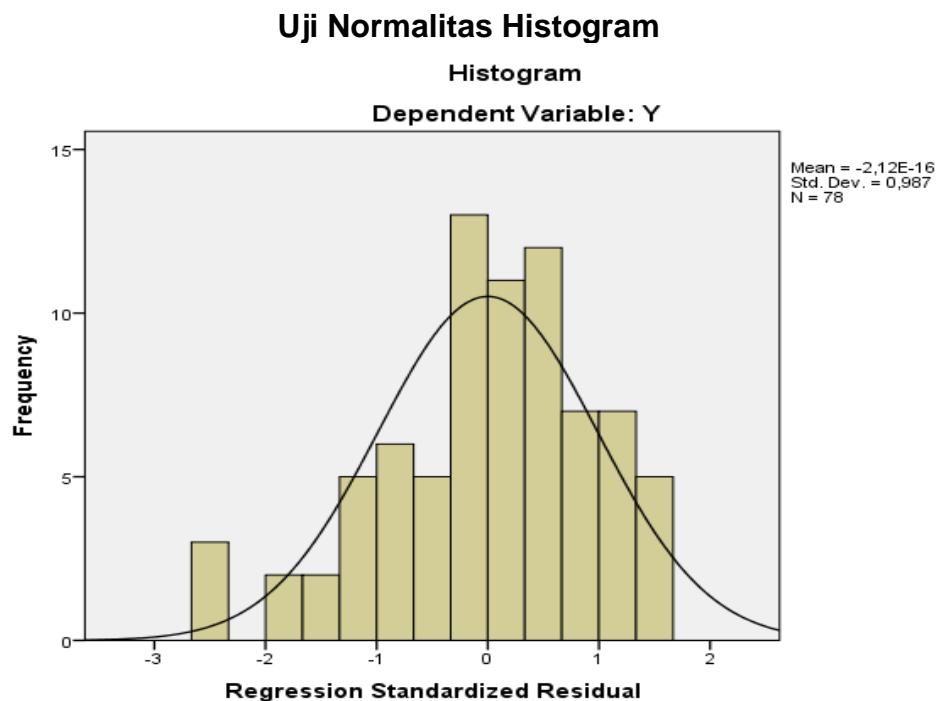
Dari Tabel 4.12 diketahui nilai *cronbach's alpha* dari variabel kinerja manajerial (Y), akuntabilitas publik (X₁) dan kejelasan sasaran anggaran (X₂) lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas untuk penelitian ini dideteksi menggunakan dua cara, yaitu analisis grafik. Melalui analisis grafik dapat dilihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu, dapat dilihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Gambar 4.1



Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pola distribusi sudah memenuhi asumsi normalitas, karena grafik kurva tertinggi berada pada titik 0. Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) erat satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik harus terbebas dari multikolinearitas untuk setiap variabel independennya. Identifikasi keberadaan

multikolinearitas ini dapat didasarkan pada nilai *Tolerance and Variance Inflation factor (VIF)*. Bila $VIF > 10$ maka dianggap ada *multikolineritas* dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya $VIF < 10$ maka dianggap bebas *multikolineritas*.

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tanda	Nilai Tolerance	Keterangan
Akuntabilitas Publik (X_1)	2,064	<	0,484	Bebas <i>multikolinearitas</i>
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	2,064	<	0,484	Bebas <i>multikolinearitas</i>

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil perhitungan nilai VIF, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran bebas multikolinearitas. Hal dikarenakan hasil uji Multikolineritas telah memenuhi asumsi VIF, dimana nilai VIF < nilai tolerance (berada di bawah 0,484).

4.6.3 Uji Autokorelasi

Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan penganggu pada periode t-1 (sebelum data diurutkan berdasarkan urutan waktu). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan *Durbin-Watson Test* (*Tabel D-W*) dalam pengambilan keputusannya adalah:

1. Angka D - W di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D - W di antara - 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D - W di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif

Tabel 4.11
Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Kriteria Keputusan	Keterangan
Akuntabilitas Publik (X_1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	1,773	Berada di antara -2 sampai 2	Tidak ada autokorelasi

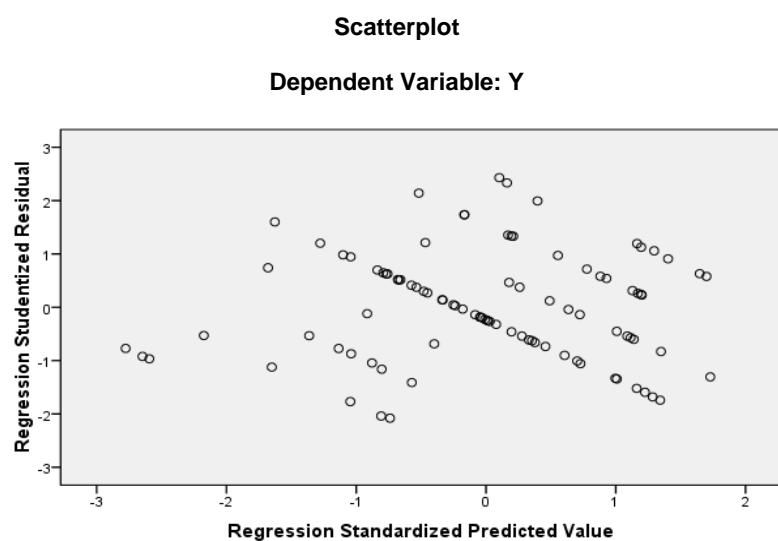
Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Berdasarkan tabel rekapitulasi uji autokorelasi di atas, diperoleh nilai D-W untuk kedua variabel independen sebesar 1,773. Ini menunjukkan bahwa nilai D-W berada di antara - 2 sampai 2 yang artinya tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2002) heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik (point-point) membentuk pola tertentu seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Hasil uji yang ditampilkan pada Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *dependent* (variabel terikat) terhadap variabel *dependent* (variabel bebas) dengan menggunakan analisis regresi *linier* berganda. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.

Tabel 4.12
Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	11,609	4,245	
1	X1	,386	,310
	X2	,647	,219
			,410

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 11.609 + 0.386 (X_1) + 0.647 (X_2) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (b_0) = 11,609. Hal ini menunjukkan jika akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran = 0 maka nilai kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 11,609.
2. Koefisien regresi akuntabilitas publik (b_1)= 0,386 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai akuntabilitas publik, maka akan meningkatkan kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,386 dengan asumsi besarnya variabel dependen lainnya adalah tetap.
3. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran (b_2)= 0,647 menyatakan bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran bertambah 1 satuan, maka kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,647 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

4.8 Pengujian Hipotesis

4.8.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t

dilakukan dengan melihat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil perhitungan dengan program SPSS for windows dapat dilihat pada Tabel 4.16.

**Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,609	4,245		2,735	,008
1 X1	,386	,310	,173	1,247	,016
X2	,647	,219	,410	2,950	,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

4.8.1.1 Hasil Uji Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singgingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel akuntabilitas publik sebesar 1,247 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya, akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singgingi.

4.8.1.2 Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probalitas t hitung untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,950 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,044. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ini menunjukkan varabel kejelasan sasaran anggaran signifikan pada level 5%. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya, kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

4.8.2 Uji F

Uji F (simultan) dilakukan untuk melihat hubungan regresi antara variabel bebas (akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (disiplin karyawan PTPN V Sei. Galuh Tapung Kabupaten Kampar). Hasil perhitungan dengan program SPSS for windows tentang nilai F signifikan yaitu:

**Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	552,295	2	276,147	16,043
	Residual	1291,000	75	17,213	
	Total	1843,295	77		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Secara simultan variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Artinya, akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur besarnya pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi uji digunakan koefisien determinasi.

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547 ^a	,300	,281	4,149

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2019.

Dari nilai koefesien determinasi ($R^2/Square$) dapat diukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel dependen. Nilai R^2 untuk persamaan di atas sebesar 0,300, artinya persentase sumbangan pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 30%, sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis ternyata akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi, karena nilai F signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapatlah disajikan pembahasan sebagai berikut:

4.10.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial

Hasil uji pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung diperoleh sebesar 1.247 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya Akuntabilitas Publik dimiliki oleh Pemerintah Daerah berperan dalam

meningkatkan Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya akuntabilitas publik, maka pelaksanaan kebijakan yang dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Artinya proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat luas akan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang diterapkan, pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku, dan audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakih (2011) dan Darmawan (2016) dan juga sejalan dengan penelitian Asrini (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heski (2017) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.

4.10.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Hasi uji Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan bahwasecara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja ManajerialOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukan oleh nilai probalitas t hitung diperoleh sebesar 2.950 dengan probabilitas sigsifikasi sebesar 0,044 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya kejelasan Sasaran Anggaran berperan dalam meningkatkan kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya kejelasan sasaran dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan, dapat memahami bagaimana kinerja diukur, dapat memiliki sasaran yang jelas yang akan membantu dalam melakukan pekerjaan, mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, mempunyai lebih dari sasaran untuk dicapai dan mengetahui mana yang paling penting dan kurang penting, serta dapat bekerja sama untuk mencapai sasaran pekerjaan, mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai dan mengetahui mana yang paling penting, sasaran dalam pekerjaan cukup menantang, dan di dalam instansi tim dapat bekerja sama untuk mencapai sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2016) dan Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan

terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ufairah (2016) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

4.10.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Secara simultan variabel Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas F hitung diperoleh sebesar 16,043 dengan probabilitas sigsifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya kinerja manajerial berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program, berperan dalam pengumpulan dan siapkan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan, berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit, berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/sub unit, berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada unit/sub unit dengan pihak luar, berperan dalam mewakilkan organisasi untuk

berhubungan dengan pihak lain diliuar organisasi, dan berpran dalam mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh.

Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.300 artinya bahwa 30% kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau persamaan regresi ini.

Anggaran pemerintah atau APBD yang pertanggungjawabannya sangat penting bagi masyarakat dengan adanya akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran disini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran *stakeholder*. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dan keberhasilan visi dan misi dapat tercapai.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsifungsi pemerintah daerah. Dimana dalam hal ini, kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat

dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) yang mengatakan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) Kota Padang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, sedangkan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Besarnyanya pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 30 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang menganggaran publik dan meningkatkan kemampuan analisis tentang APBD.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disarankan agar lebih memperhatikan proses penyusunan anggaran terutama pada kalender penyusunan APBD.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel-variabel yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga lebih mencerminkan hasil yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* (Edisi Revisi VI), Jakarta : Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar,* Jakarta: Erlangga.
- Iskandar. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).* Jakarta : Gaung Persada Press.
- LAN dan BPKP. 2013. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Jakarta:LAN RI.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. A. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo 2011. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.* Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat.
- Raba, Manggaukang. 2012. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Riduan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung : Alfabeta.
- Rosjidi, 2012. *Teori Akuntansi Tinjauan Konsep dan Stuktur,* Jakarta : FE-UI.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2013. *Kebijakan Publik yang Membumi.* Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) dan Lukman Offset.
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial.* Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

B. Skripsi/Jurnal/Makalah

- Aji, Fakih Sabdanala. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Asrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD di pemerintah daerah Kota Palu. Jurnal katalogis. Vol.5, No.1. Hal.52-58.
- Asrini, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., Sinarwati, N. K. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2, No.1
- Darmawan, R. 2016. Pengaruh akuntabilitas publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. Jom Fekom. Vol.3, No.1
- Heski, Petriana 2017. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang)*. ISSN: 2407-9189
- Primadana, G. H. M., Yuniarta, G. A., Adiputra, M. P. 2014. Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten Badung). e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2 No. 12, hal 1-11.
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang*, Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sumolang, J. H. 2015. *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Intervening*. Vol. 2, No. 1.
- Ufairah, Afifah Nur. 2016. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi)*. Jurnal. Universitas Jambi. Vol. 2 No.2, hal 1-11.
- Putri, Citra Lardiana. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja*

Manajerial Pada SKPD Kota Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Wahyuni, Rasuli, Diyanto 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Pemerintahan Kota Pekanbaru.* Jurnal. JOM FEKON Vol.1 No.2.

Yulianti, Reni. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan).* Jurnal. JOM FEKON Vol.1 No.2.

Lampiran 1

KUISIONER TENTANG

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No Responden
(Di isi oleh peneliti)

Kepada Yth

Bapak/Ibu

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama dengan ini, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Bapak/Ibu selalu sehat wal'afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Melalui lembaran kuisioner ini, disampaikan bahwa saya :

Nama : Keke Hasmita

Nim : 15021436

Program Studi : Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi". Kuisioner ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan skripsi pada Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), maka dari itu informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat mengisinya dengan sebanar-benarnya. Atas partisipasi bapak/Ibu mengisi kuisioner ini maka saya ucapkan terima kasih.

Taluk Kuantan, September 2019

Keke Hasmita

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Bacalah dengan cermat setiap pertanyaan dan pilih salah satu alternatif jawaban yang menurut anda benar.
2. Beri tanda silang (x) atau lingkarilah jawaban pada salah satu alternatif jawaban dari pertanyaan kuesioner yang dipilih.
3. Apabila jawaban diganti, berikan tanda (=) pada jawaban yang salah, kemudian silang jawaban yang menurut anda benar.
4. Dalam menjawab pertanyaan kuisioner ini, mohon dilakukan dengan memberikan jawaban yang sejurnya.
5. Setiap pertanyaan harus diisi tanpa ada yang dilewatkan, demi kelengkapan data penelitian.
6. Terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu berikan melalui kuisioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :.....*
2. Jenis kelamin : () Laki-laki () Perempuan
3. Umur : () 20 – 30 tahun () 31 – 40 tahun
() 40 tahun ke atas
4. Pendidikan terakhir : () SLTP () SLTA () Akademi () S-1 () S-2

Keterangan:

* Boleh tidak diisi.

I. KINERJA MANAJERIAL OPD

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program					
2	Saya berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan					
3	Saya ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan.					
4	Saya berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit atau sub unit saya					
5	Saya berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit atau sub unit saya.					
6	Saya berperan dalam mengelola, mengatur dan memilih pegawai pada uni/sub unit saya					
7	Saya berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada pada uni/sub unit saya dengan pihak luar					
8	Saya berperan dalam mewakilkan organisasi daya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi.					
9	Saya mengevaluasi kinerja saya secara keseluruhan					

II. AKUNTABILITAS PUBLIK

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pelaksanaan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban sesuai kondisi dan hasil yang ada. Serta penggunaan anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.					
2	Prosedur yang digunakan dalam melaksakan program kegiatan telah sesuai dengan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen.					

3	Program-program anggaran dirancang dengan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan pencapaian target serta hasil output maksimal					
4	Pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat lain.					

III. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya					
2	Saya memahami bagaimana kinerja saya diukur					
3	Saya memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya dalam melakuikan pekerjaan					
4	Saya mempunyai batas waktu mencapai sasaran pekerjaan					
5	Jika saya mempunyai lebih satu sasaran untuk dicapai, saya mengetahui mana yang paling penting dan kurang penting					
6	Sasaran dalam pekerjaan saya cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah walaupun sulit)					
7	Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran					

Lampiran 2

TABULASI KUISIONER PENELITIAN

35	4	5	4	4	3	4	5	4	4	37
36	3	5	3	3	3	3	4	4	4	32
37	4	5	5	4	5	4	5	4	4	40
38	3	3	4	4	4	4	5	3	4	34
39	3	4	5	3	3	5	5	5	3	36
40	2	5	5	3	3	5	5	2	4	34
41	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
42	5	5	4	5	5	4	5	5	4	42
43	3	4	3	4	3	3	3	3	3	29
44	4	3	3	5	3	3	5	2	4	32
45	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
46	5	5	5	4	4	5	5	4	5	42
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
48	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
49	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
50	4	3	3	4	3	5	3	4	4	33
51	3	4	4	3	4	4	3	3	4	32
52	4	5	4	4	3	4	5	4	4	37
53	4	3	4	3	3	2	5	5	3	32
54	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
55	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
56	3	3	5	3	3	3	3	4	3	30
57	4	3	4	4	3	4	3	4	3	32
58	4	4	4	5	4	5	5	5	4	40
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
60	3	3	3	3	5	5	5	5	5	37
61	4	5	5	5	4	4	5	5	5	42
62	5	5	4	4	3	3	5	4	3	36
63	3	5	3	5	5	4	5	5	5	40
64	5	5	5	5	4	4	3	5	5	41
65	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
67	5	4	5	5	4	5	5	4	5	42
68	4	5	5	3	5	3	5	5	4	39
69	4	5	5	5	5	4	4	4	4	40
70	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41
71	4	4	5	5	4	4	5	5	5	41
72	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
73	4	4	4	5	2	3	5	5	2	34
74	5	5	5	5	5	5	5	2	4	41
75	4	3	4	4	4	3	3	3	3	31

76	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42
77	4	3	4	3	4	3	3	3	3	30
78	4	4	3	3	4	4	5	3	4	34

Resp	AKUNTABILITAS PUBLIK (X1)				Skor Total
	P_1	P_2	P_3	P_4	
1	3	4	3	4	14
2	5	5	5	3	18
3	5	5	4	4	18
4	4	4	3	3	14
5	4	3	4	4	15
6	3	3	3	4	13
7	5	5	3	4	17
8	5	5	4	4	18
9	4	4	4	3	15
10	4	4	3	4	15
11	3	3	4	3	13
12	3	5	4	4	16
13	5	3	3	3	14
14	4	5	4	4	17
15	3	3	3	3	12
16	3	4	3	4	14
17	5	3	5	3	16
18	5	5	4	4	18
19	3	4	4	5	16
20	4	3	4	2	13
21	5	4	4	4	17
22	3	3	3	3	12
23	5	4	3	4	16
24	5	3	4	4	16
25	5	5	5	5	20
26	4	4	5	4	17
27	5	5	5	5	20
28	4	5	4	4	17
29	4	5	5	5	19
30	5	4	5	4	18
31	5	3	4	4	16
32	5	5	4	4	18
33	5	5	5	5	20
34	3	4	4	4	15
35	5	5	3	4	17

36	3	3	5	3	14
37	5	5	4	4	18
38	4	4	3	3	14
39	4	5	4	4	17
40	3	4	3	4	14
41	3	3	3	4	13
42	4	4	4	4	16
43	3	3	4	3	13
44	4	3	3	4	14
45	4	4	4	3	15
46	5	5	4	4	18
47	3	4	3	3	13
48	5	5	4	4	18
49	4	4	3	3	14
50	3	3	3	4	13
51	3	5	5	3	16
52	4	3	4	4	15
53	3	4	4	5	16
54	4	5	4	2	15
55	5	4	4	4	17
56	3	3	3	3	12
57	4	4	3	4	15
58	5	5	4	4	18
59	5	5	5	5	20
60	5	5	5	4	19
61	5	5	5	5	20
62	3	3	4	4	14
63	4	5	5	5	19
64	5	4	5	4	18
65	5	5	4	4	18
66	5	5	4	4	18
67	5	5	5	5	20
68	3	4	4	4	15
69	4	3	3	4	14
70	5	3	5	3	16
71	4	5	4	4	17
72	3	3	3	3	12
73	3	4	4	4	15
74	3	3	5	4	15
75	5	4	3	4	16
76	4	5	4	4	17

77	5	4	4	3	16
78	4	3	3	4	14

NO	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2)							Skor Total
	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	
1	3	4	5	4	2	4	3	25
2	4	4	3	5	5	4	3	28
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	3	3	4	4	23
5	4	4	4	4	3	4	3	26
6	4	4	4	4	3	4	3	26
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	5	5	4	4	4	4	4	30
9	4	4	4	3	4	4	4	27
10	3	4	5	4	2	4	3	25
11	3	3	3	3	2	2	2	18
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	3	3	3	3	4	4	23
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	3	3	3	3	3	4	4	23
16	3	4	5	4	2	4	3	25
17	4	4	3	5	3	4	4	27
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	3	3	4	4	3	3	4	24
20	5	4	4	5	4	3	4	29
21	3	5	4	4	4	4	4	28
22	4	4	3	3	3	4	4	25
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	5	5	4	4	4	30
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	5	4	5	4	2	4	5	29
27	4	4	5	5	5	4	5	32
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	5	5	5	5	5	4	34
30	4	4	4	4	5	4	5	30
31	4	4	4	4	5	4	4	29

32	4	4	5	5	4	4	4	30
33	5	4	4	4	4	4	4	29
34	4	4	3	4	4	4	4	27
35	3	4	5	4	2	4	3	25
36	4	4	3	5	5	4	3	28
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	3	3	3	3	3	4	4	23
39	4	4	4	4	3	4	3	26
40	4	4	4	4	3	4	3	26
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	5	5	4	4	4	4	4	30
43	4	4	4	3	4	4	4	27
44	3	4	5	4	2	4	3	25
45	3	3	3	3	2	2	2	18
46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	3	3	3	3	3	4	4	23
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	3	3	3	3	3	4	4	23
50	3	4	5	4	2	4	3	25
51	4	4	3	5	3	4	4	27
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	3	3	4	4	3	3	4	24
54	5	4	4	5	4	3	4	29
55	3	5	4	4	4	4	4	28
56	4	4	3	3	3	4	4	25
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	4	5	5	4	4	4	30
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	5	4	5	4	2	4	5	29
61	4	4	5	5	5	4	5	32
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	5	5	5	5	5	5	4	34
64	4	4	4	4	5	4	5	30
65	4	4	4	4	5	4	4	29
66	4	4	5	5	4	4	4	30
67	5	4	4	4	4	4	4	29
68	4	4	3	4	4	4	4	27
69	3	4	5	4	2	4	3	25
70	4	4	3	5	5	4	3	28
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	3	3	3	3	3	4	4	23

73	4	4	4	4	3	4	3	26
74	4	4	4	4	3	4	3	26
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	5	4	4	4	4	4	30
77	4	4	4	3	4	4	4	27
78	3	4	5	4	2	4	3	25

Lampiran 3

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

1. Kinerja Manajerial (Y)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	78	2	5	3,95	,866
Y2	78	2	5	4,03	,805
Y3	78	3	5	4,04	,763
Y4	78	2	5	3,86	,879
Y5	78	2	5	3,74	,844
Y6	78	2	5	3,88	,773
Y7	78	3	5	4,26	,932
Y8	78	2	5	3,78	,878
Y9	78	2	5	3,91	,724
Valid N (listwise)	78				

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1,3	1,3	1,3
3	28	35,9	35,9	37,2
Valid 4	23	29,5	29,5	66,7
5	26	33,3	33,3	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

2	1	1,3	1,3	1,3
3	21	26,9	26,9	28,2
Valid 4	31	39,7	39,7	67,9
5	25	32,1	32,1	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	21	26,9	26,9	26,9
Valid 4	33	42,3	42,3	69,2
5	24	30,8	30,8	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	3,8	3,8	3,8
3	27	34,6	34,6	38,5
Valid 4	26	33,3	33,3	71,8
5	22	28,2	28,2	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	4	5,1	5,1	5,1
3	28	35,9	35,9	41,0
Valid 4	30	38,5	38,5	79,5
5	16	20,5	20,5	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2,6	2,6	2,6
3	22	28,2	28,2	30,8
Valid 4	37	47,4	47,4	78,2
5	17	21,8	21,8	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	26	33,3	33,3	33,3
Valid 4	6	7,7	7,7	41,0
5	46	59,0	59,0	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	9,0	9,0	9,0
3	19	24,4	24,4	33,3
Valid 4	36	46,2	46,2	79,5
5	16	20,5	20,5	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Y9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	1,3	1,3	1,3
Valid 3	21	26,9	26,9	28,2
4	40	51,3	51,3	79,5

5	16	20,5	20,5	100,0
Total	78	100,0	100,0	

2. Akuntabilitas Publik (X1)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	78	3	5	4,12	,837
X1.2	78	3	5	4,09	,825
X1.3	78	3	5	3,92	,734
X1.4	78	2	5	3,83	,673
Valid N (listwise)	78				

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	29,5	29,5	29,5
	4	29,5	29,5	59,0
	5	41,0	41,0	100,0
Total		100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	29,5	29,5	29,5
	4	32,1	32,1	61,5
	5	38,5	38,5	100,0
Total		100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	24	30,8	30,8
	4	36	46,2	76,9
	5	18	23,1	100,0
	Total	78	100,0	100,0

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,6	2,6
	3	19	24,4	24,4
	4	47	60,3	87,2
	5	10	12,8	100,0
	Total	78	100,0	100,0

3. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P1	78	3	5	3,90	,656
P2	78	3	5	3,97	,509
P3	78	3	5	4,03	,702
P4	78	3	5	4,04	,633
P5	78	2	5	3,62	,943
P6	78	2	5	3,95	,453
P7	78	2	5	3,83	,633
Valid N (listwise)	78				

Frequency Table

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

	3	21	26,9	26,9	26,9
Valid	4	44	56,4	56,4	83,3
	5	13	16,7	16,7	100,0
	Total	78	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	11	14,1	14,1
Valid	4	58	74,4	88,5
	5	9	11,5	100,0
	Total	78	100,0	100,0

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	18	23,1	23,1
Valid	4	40	51,3	74,4
	5	20	25,6	100,0
	Total	78	100,0	100,0

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	3	14	17,9	17,9
Valid	4	47	60,3	78,2
	5	17	21,8	100,0
	Total	78	100,0	100,0

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	12	15,4	15,4	15,4
3	19	24,4	24,4	39,7
Valid 4	34	43,6	43,6	83,3
5	13	16,7	16,7	100,0
Total	78	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2,6	2,6	2,6
3	4	5,1	5,1	7,7
Valid 4	68	87,2	87,2	94,9
5	4	5,1	5,1	100,0
Total	78	100,0	100,0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	2	2,6	2,6	2,6
3	17	21,8	21,8	24,4
Valid 4	51	65,4	65,4	89,7
5	8	10,3	10,3	100,0
Total	78	100,0	100,0	

Lampiran 4

HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

1. Kinerja Manajerial (Y)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	78	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	78	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	31,50	18,825	,580	,810
P2	31,42	19,338	,558	,813

P3	31,41	19,570	,561	,813
P4	31,59	18,479	,621	,806
P5	31,71	18,756	,611	,807
P6	31,56	19,626	,543	,815
P7	31,19	18,651	,549	,815
P8	31,67	20,069	,394	,832
P9	31,54	20,486	,447	,825

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35,45	23,939	4,893	9

2. Akuntabilitas Publik (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	78	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	78	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,677	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	11,85	2,833	,455	,615
P2	11,87	2,633	,562	,536
P3	12,04	3,154	,430	,628
P4	12,13	3,386	,395	,649

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,96	4,817	2,195	4

3. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	78	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	78	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,824	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	23,81	12,469	,583	,798
P2	23,73	12,901	,559	,802
P3	23,72	12,932	,595	,796
P4	23,90	12,405	,583	,798
P5	24,01	12,584	,582	,798
P6	23,87	13,152	,542	,804

P7	23,50	12,409	,534	,807
----	-------	--------	------	------

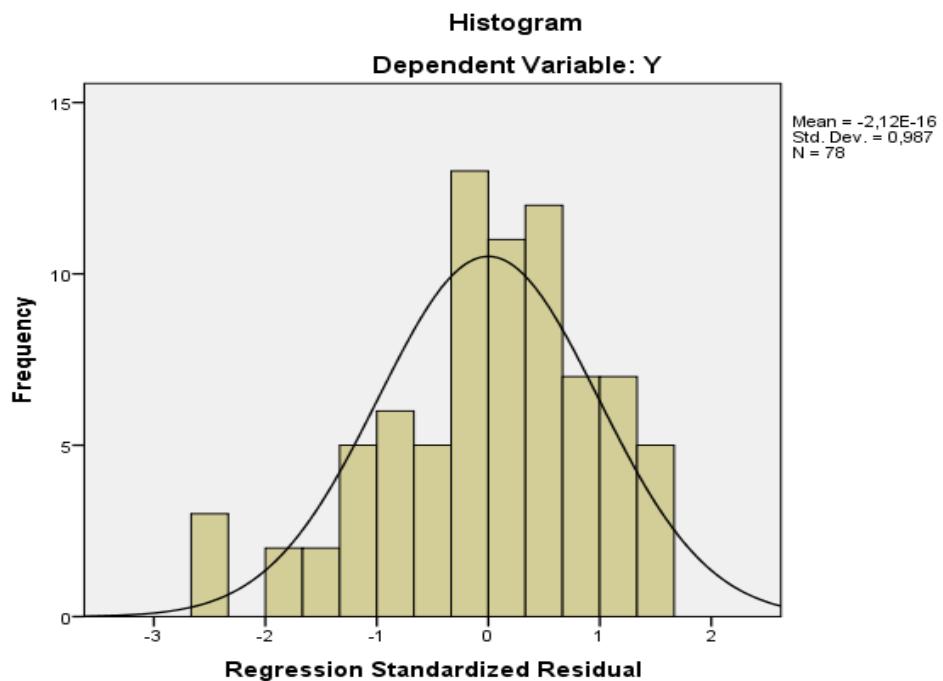
Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27,76	16,784	4,097	7

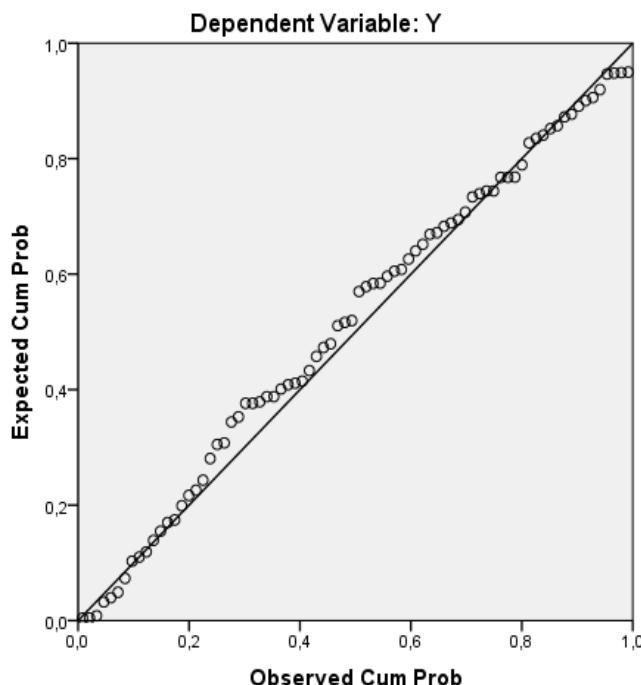
Lampiran 5

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	11,609	4,245			
1 X1	,386	,310	,173	,484	2,064
X2	,647	,219	,410	,484	2,064

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,547 ^a	,300	,281	4,149	1,773

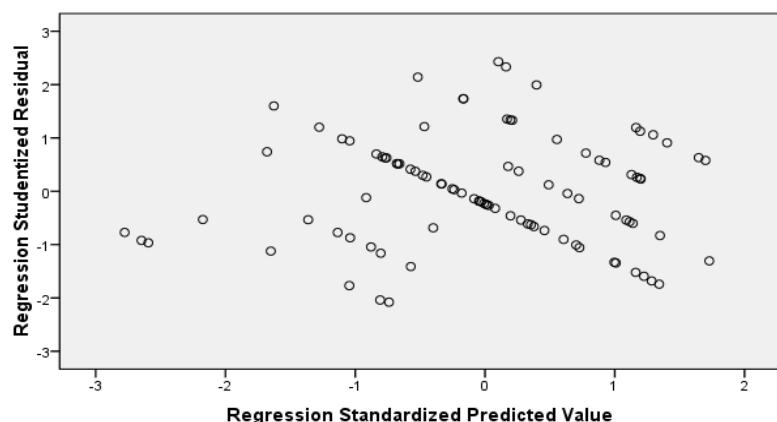
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

4. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran 6

HASIL UJI HIPOTESIS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,609	4,245		2,735	,008
1	,386	,310	,173	1,247	,016
X2	,647	,219	,410	2,950	,004

a. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547 ^a	,300	,281	4,149

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	552,295	2	276,147	16,043	,000 ^b
1 Residual	1291,000	75	17,213		
Total	1843,295	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Lampiran 7

R Tabel

N	Taraf Signifikan	N	Taraf Signifikan	N	Taraf Signifikan
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,686	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,582	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,195
13	0,553	37	0,325	125	0,173
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,149
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,488	42	0,304	400	0,098
19	0,458	43	0,301	500	0,068
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070

23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	30	0,279		

Sumber: Sugiyono (2010:332)

Lampiran 8

T tabel

N	Level of Significance				
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747
5	0,727	1,486	2,015	2,571	3,365
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143
7	0,711	1,415	1,865	2,365	2,998
8	0,705	1,397	1,860	2,306	2,896
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718
12	0,685	1,356	1,782	2,178	2,681
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624
15	0,690	1,341	1,753	2,132	2,623
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567
18	0,688	1,330	1,743	2,101	2,552
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,530
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528

21	0,686	1,323	1,721	2,000	2,518
22	6860,	1,321	1,717	2,074	2,508
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,185
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423
60	0,679	1,296	1,658	2,000	2,390
120	0,677	1,289	1,645	1,980	2,358
α	0,674	1,282	1,632	1,960	2,325

Sumber: Sugiyono (2010:333)

BIODATA

I. Data Pribadi

Nama	:	Keke Hasmita
Tempat,Tanggal lahir	:	Jake, 03 Juli 1997
Alamat	:	Desa Jake
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
No. Telepon/Wa	:	082386160217
E-mail	:	Keke.hasmita.kh@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 015 Jake (Lulus Tahun 2009)
2. SMPN 7 Teluk Kuantan (Lulus Tahun 2012)
3. SMKN 2 Teluk Kuantan (Lulus Tahun 2015)
4. S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (Lulus Tahun 2020)

III. Pengalaman

Pernah magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, April 2020

Keke Hasmita
NPM. 140215036